



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE



diskominfo

Kabupaten Bone

**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LkjiP)**

2018

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BONE



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone ,maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone untuk mempertanggung jawabkan amanah tersebut dengan menunjukkan akuntabilitas kinerjanya setiap tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab. Bone.

LAKIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*) serta mendorong peningkatan pelayanan public dan partisipasimasyarakat .LAKIP ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban formal Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang dilakukan setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masapemerintahan bupati terpilih.

Penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini berdasarkan analisis realisasi pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018, dan mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab. Bone dalam rangka memenuhi kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati Bone dan Masyarakat Kabupaten Bone melalui Perwakilan Rakyat di



DPRD Kab.Bone.**Kedua**, sebagai sarana evaluasi mandiri (*selfevaluation*) atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone guna penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebijakan organisasi dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone.

Dengan demikian, Kami berharap LAKIP ini menjadi media pertanggung jawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan/kebijakan organisasi dan mendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab. Bone di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik&Bersih (Clean & Good Government) pada Pemeritahan Kabupaten Bone.

Watampone, 22 Januari 2019

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika
danPersandian Kab.Bone,**



Drs. ANDI AMRAN. M.Si.

Pangkat : Pembina UtamaMuda

Nip. : 19681122 198908 1 00 1



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Isu Strategis	5
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
Rencana Strategis	9
Visi	9
Mis	9
Tujuan dan Indikator Kinerja	10
Program Untuk Pencapaian Sasaran	14
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
Indikator Kinerja Utama IKU	
Rencana Anggaran Tahun 2018	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
Capaian Kinerja Organisasi.....	27
Capaian IndikatorKinerja Utama	29
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun	34
- Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja tahun ini ..	



- Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir
 - Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 - Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
 - Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber daya
 - Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja Pencapaian Kinerjalainya
- Realisasi Anggaran**



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Jumlah SDM Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab. Bone Tahun 2018	4
Tabel 1.1	Inovasi Pelayanan Publik Bone.....	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja	11
Tabel 2.2	Program Pencapaian Sasaran	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja 2019	18
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
Tabel 2.5	Rencana Kerja Anggran Tahun 2019	25
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Sasaran	34
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Utama IKU 2018	35
Tabel 3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 3.3	Realisasi Anggran	51
Tabel 3.4	Pemanfaatan Anggran	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja



suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.



1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB.BONE

Pembentukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone merupakan unsur Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Urusan Pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Bone Nomor 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone mempunyai Tugas yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya menyelenggarakan.

b. Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone

Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone yaitu sebagai berikut:

- 1) *Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Informasi dan Komunikasi.*
- 2) *Menambah sarana dan Prasarana Jaringan Informasi dan Komunikasi*



- 3) Meningkatkan Pemanfaatan sistem Aplikasi yang terintegrasi di semua Lembaga Pemerintah (E-Govermenet).
- 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi'
- 5) Meningkatkan Kerjasama kemitraan bersama Media Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi.
- 6) Optimalisasi Jaringan Informasi dan Komunikasi yang ada.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bone dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas selain tugas pemerintahan umum dan politik.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone beserta jajaran Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

c. Struktur Organisasi

Hingga tahun 2019, jumlah personil/SDM Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebanyak 30 (Tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari 17 Laki-laki dan 13 Perempuan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1. Jumlah SDM Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018 .

No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1.	SD	-	1.	I	-	1.	Struktural	31
2.	SMP	-	2.	II	4		- Eselon II = 1 orang	
3.	SMA	6	3.	III	22		- Eselon III = 5 orang	
4.	Diploma 1	-	4.	IV	5		- Eselon IV = 18 orang	
5.	Diploma 3	-				2.	Fungsional	



6.	Sarmuda/D3	-					
7.	Strata 1	19					
8.	Strata 2	7					
						3.	Staf
							6
	Jumlah	31		Jumlah	31		Jumlah
							31

1.4 ISU STRATEGIS

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone merupakan Isu Strategis utama yang menjadi tujuan pelaksanaan pengelolaan Informasi Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone baik dalam jangka Pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka Panjang.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Pencapaian *Visi Misi Bupati Bone periode tahun 2013-2018*, yaitu untuk mewujudkan *Masyarakat Bone Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi.

Kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

a) Faktor Internal

Kekuatan organisasi secara internal, yaitu :

- Dukungan dan Komitmen penuh dari unsur Pimpinan daerah (Bupati, wakil Bupati dan sekda) pengambil Kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Komunikasi atas penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone.



- Motivasi Kerja yang Tinggi dari seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten bone ;
- Dukungan Kerjasama dan Sinegritas dengan aparat Eksternal dan Internal lainnya, baik di Tingkat Provinsi maupun Pusat;

Kelemahan organisasi secara internal, yaitu :

- Masih terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan kemampuan SDM yang ada, khususnya dalam hal:
 - Pelaksanaan terhadap administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
 - Pelaksanaan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan beserta laporan capaian kinerja dan keuangan, dan juga pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian khususnya ruangan Gedung Kantor beserta Perlengkapannya Meubeleurnya (Meja dan kursi kerja).
- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang nilainya sekitar 0,3% total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten.

b) Faktor Eksternal

Kekuatan organisasi secara eksternal, yaitu :

- Dukungan dan komitmen secara penuh dari Bupati Bone selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone;
- Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Eksternal lainnya, baik dengan BPK-RI, BPKP,Muspida dan Dinas Komunikasi dan Persandian.
- Motivasi Kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone.



Kelemahan organisasi secara eksternal, yaitu :

- Masih terbatasnya kompetensi dan Kapasitas aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone
- Komitmen dan Konsisten jajaran pimpinan pada SKPD Lingkup Kabupaten Bone yang masih rendah untuk melaksanakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuandari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah, khususnya dalam hal penyebaran Informasi.
- Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Pwersandian Kab.Bone yang nilainya sekitar 0,3% dari total anggaran (APBD) Pemerintah kabupaten Bone,

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bonedalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi informasi yang tidak terbendung.
- b. Munculnya isu-isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis Saran dan tuntutan pemekaran wilayah.
- c. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- d. Belum optimalnya pendidikan politik, peran partai politik dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pengelolaan administrasi partai politik.
- e. Sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia yang masih kurang (infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan).
- f. Jumlah penegak hukum belum sebanding dengan jumlah penduduk.



- g. Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah, karena masih rendahnya pendidikan masyarakat dan belum optimalnya peran Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam masyarakat.
- h. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.
- i. Isu pemekaran wilayah, akan mengurangi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia terpecah.
- j. Konflik horizontal, terkait dengan penguasaan / kepemilikan lahan antara sebagian penduduk dengan perusahaan.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah

No	Nama Inovasi	Tahun	Keterangan
1	Sistem Database Desa dan Kelurahan (SDDK)	2017	Sistem Data Base Desa salah Satu inovasi yang di kembangkan Oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone pada Tahun 2017 dan sudah terlaksana selama dua Tahun Anggaran 2017/2018



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Periode Tahun 2013-2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018. Sinkronisasi dokumen perencanaan ini di arahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Bone terpilih sebagai yang mana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018, yaitu :

MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA

Sejalan dengan Visi Bupati Bone tersebut di atas dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone, maka di dalam Renstra Tahun 2013-2018 ditetapkan Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone

2.1.1 VISI

Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone Tahun 2013-2018,yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Bone yang Informatif Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan sejahtera.

2.1.2 MISI

- 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Informasi dan Komunikasi;*
- 2. Meningkatkan sarana dan Prasarana Jaringan Informasi dan Komunikasi ;*



3. *Meningkatkan Pemanfaatan sistem aplikasi yang terintegritas di Semua Lembaga Pemerintahan (E-Government)*
4. *Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang berbasis teknologi Informasi*
5. *Meningkatkan Kerjasama kemitraan bersama Media Informasi dan Komunitas Teknologi Informasi.*
6. *Otimalisasi Jaringan Informasi dan Komunikasi yang ada;*

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

1. *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah;*
2. *Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone dan Kapasitas Tata Kelola Pengelolaan Informasi pemerintah Daerah ;*



2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone

NO	TUJUAN
1	Tersedianya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah
2	Terlaksana Rumusan Kebijakan yang aspiratif dan partisipatif
3	Terlaksana Pelayanan Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan Informasi Publik
4	Terlaksana Peran dan Kemampuan untuk menyerap Informasi dan menyebarluaskan Informasi Pembangunan Daerah
5	Terlaksana Akses Layanan E-Government
6	Terlaksana Sistem Layanan dan Pengamanan Informasi/Berita Persandian
7	Terlaksana Pelayanan Komunikasi Informasi untuk mewujudkan Pengelolaan pemerintah yang Transparan dan Akuntabel



2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 2.2

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tersedianya Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah base Statistik Dearah	Jumlah	65	90`
Terlaksananya Rumusan Kebijakan yang aspiratif dan Partisipatif	Tersedianya bahan Rumusan Kebijakan yang aspiratif dan partisitaf dari Masyarakat	Jumlah	14	22
Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik dalam mendukung keterbukan informasi Publik	Tersedianya Sinergi dan Integrasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Jumlah	66	66



Terlaksananya Peran dan Kemampuan untuk menyebarluaskan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyebaran Luasan Informasi Pemerintah Daerah melalui sarana Media diluar Ruang Internet	Jumlah	70	100
Terlaksanya Akses Layanan E-Goverment	Tersedianya Layanan E-Government	Persentase	25%	100
Terlaksanya Sistem Layanan dan Pengamanan Informasi/Berita Persandian	Terselenggaranya Layanan Pengelolaan dan Pengamaan Informasi/Berita Persandian	Jumlah	1550	2195
Terlaksanya Pelayanan Komunikasi Informasi untuk mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Transpran dan Akuntabel	Tersedianya Media Saluran Komunikasi dan Informasi	Jumlah	14	22



2.1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Akses layanan Informasi dan Aspirasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Program Fasilitas Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi - Program Kerjasama dengan Mass Media - Program Pengelohan Komunikasi Informasi Publik
Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi dan Persandian



Meningkatnya akuntabilitas organisasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan- Program Penunjang Pemerintahan Umum
--	--



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Sebagai Wujud Komitmen Dinas Komunikasi Informatika dan persandian ka.Bone dalam Pencapaian target Kinerja Tahun 2018 yang di tanda tangani bersama oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kabupaten Bone dengan Bapak Bupati Bone (Tersaji pada **Lampiran 1**) Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan bahan evaluasi akuntabilitas pencapaian kinerja oleh Bupati Bone terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil.

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Tahun 2018 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone disertai dengan lampiran formulir yang menyajikan korelasi Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Tahun 2018, beserta Program dan Kegiatan beserta Anggarannya untuk pencapaiannya.

Ringkasan atau Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone Tahun 2018, tersaji dalam table berikut ini :



Tabel2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan persandianKab. Bone Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akses Layanan Aspirasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Saluran layanan Aspirasi • Kualitas Standar Pelayanan aspirasi /Aduan • Prosentaseaspirasi/aduan yang ditindaklanjuti. 	5 Saluran <ul style="list-style-type: none"> - Saluran Layanan Aduan Kotak Saran - SMS/WA/LINE - Media Sosial (FB,Twitter,Telegram) - Online Melalui Website - Radio 100% 90%
2	Meningkatnya Akses Layanan E-Goverment	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan system aplikasi • Persentase PD yang memanfaatkan aplikasi • Persentase penggunaan jaringan internet pada PD 	6 (Enam) Aplikasi (E-SIRUP, SIPPD, E-PLANNING, E-BUDGETING,E-PARKIR DAN Eoffice) 30 % SKPD 100% SKPD 10% SKPD



		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penggunaan jaringan intranet pada PD • Jumlah website dan sub domain milik Pemerintah Daerah 	1 Website 17 Subdomain
3	Meningkatnya Akses Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Saluran Penyampaian Informasi Publik • Jangkauan Masyarakat dapat Mengakses Informasi Publik • Persentase RT yang Menggunakan HP, Radio dan TV • Jumlah KIM yang dibina • Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bone • Persentase Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Media Online = 11 Media • Audio = 3 Channel Radio • Audio Visual = 2 Channel TV • Media Cetak =4 Koran/ Majalah • Baliho,Spanduk,dll = 30 titik Lokasi 80% Kelompok Informasi Masyarakat = KIM PPID Utama : 1 Unit PPID Pembantu : 66 Unit 50% Wilayah 50% (185 Desa/Kelurahan)



		<p>Terjangkau siaran Radio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase wilayah terjangkau Siaran televisi • Persentase kecamatan terjangkau Media Cetak • Persentase wilayah Terjangkau Media online (GSM/CDMA) 	<p>100%</p> <p>50% (186 Desa/Kelurahan)</p>
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Dan Data Statistik Tertentu serta data lainnya sebagai Bahan Penyusun Kebijakan, Perencanaan, pelaporan dan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan ketersediaan data sesuai kebutuhan 	90 %
5	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SKPD yang Menggunakan System Persandian dengan Efektif 	90%



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka Pengukuran dan Peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMALISASI CAPAIAN TARGET	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akses layanan Informasi dan Aspirasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Media/Saluran Informasi Publik yang Efektif - Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik - Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasayarakatan yang di Publikasikan - Persentase Aspirasi /Aduan yang di Tindak Lanjuti 	$\frac{\text{Jumlah Media/Saluran Informai yg Efektif}}{\text{Jumlah Media}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Pemenuhan Data dan Informasi Publik}}{\text{Jumlah Permintaan Data Dan informasi Publik yg Masuk}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Konten Informasi yg Terpublikasi}}{\text{Jumlah Informasi yg Seharusnya}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Aspirasi/ Aduan yang Ditindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Aspirasi /Aduan Yang Masuk}} \times 100$	100% 100% 100% 100%



2	Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government	-Persentase Layanan Publik yang dapat di Akses Secara Online -Persentase E-Government yang Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang Mengakses Secara Online}}{\text{Jumlah SKPD Yang Ada}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Aplikasi Integrasi E-Government}}{\text{Jumlah SKPD yang Ada}} \times 100$	58% 46%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah.	-Persentase Dokumen Statistik daerah Dirilis Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Data Yang terisi}}{\text{Jumlah Instrumen}} \times 100$	80%
4	Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah.	- Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yg Memanfaatkan Sandi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Ada}} \times 100$	100%

2.4 RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2018

Tabel 2.Rencana Belanja Dinas Kominfo TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.607.483.037,00	
2	Belanja Langsung	Rp. 3.650.000.000,00	
Jumlah		6.257.483.037,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :



Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Kominfo selama Satu tahun Tahun Anggaran	Cakupan	Program Pelayanan	Penyediaan Jasa	58.000.000	96,75%
	Pelayanan	Administrasi	Komunikasi ,		
	Administrasi	Perkantoran	Sumber Daya Air		
	perkantoran		dan Listrik		
	terhadap		Penyediaan Jasa		
	Pleaksanaan		administrasi	213.912.200	98,24%
Program dan Kegiatan Dinas Kominfo selama satu Tahun Anggran	Program dan		Keuangan		
	Kegiatan Dinas		Penyediaan Jasa		
	Kominfo selama		Administrasi kantor	4000.000	100,00%
	satu Tahun		Penyediaan		
	Anggran		Komponen Instalasi	5000.000	99,84%
			listrik /Penerangan		
			bangunan Kantor		
			Penyediaan Bahan		
			Bacaan dan		
			peraturan	11.730.000	100,00%
			perundang-		
			Undangan		



			Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	324.943.000	99,94%
			Pelaksanaan Administrasi perkantoran	296.375.000	99,85%
Cakupan Peningkatan Mutu dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengawasan sesuai Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Pada tahun Anggaran berkenan	Cakupan Peningkatan Mutu dan kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengawasan sesuai Rencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan PereInkapan Gedung kantor	29.750.000	100,00,%
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	407.000.000	99,91%
			Pengadaan Meubeler	51.000.000	100,00%
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	100.000.000	100,00,%
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90.000.000	92,78%
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	20.000.000	99,98%



		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000	99,94%
Cakupan Penyusunan dan Penyampaian Dokumen – Dokumen Perencanaan dan laporan capian dalam Pelaksanaan Tupoksi Diskominfo selama satu tahun Anggaran	Cakupan Penyusunan dan penyampaian Dokumen- Dokumen Perencanaan dan laporan Capian	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	36.752.000	99,96%
			Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	26.100.000	99,99%
Meningkatnya Ketersediaan Data Dan Informasi Statistik Sektoral Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah Sesuai Kebutuhan Dirilis Tepat waktu	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah	Pengolahan Updating dan Analisis Dan Statistik Daerah	80.300.000	99,81%
			Verifikasi dan Validasi Sistem Data base Desa (SDD)	93.785.000	99,64%



			Penyusunan dan pengumpulan Data Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	141.000.000	99,47%
Meningkatnya Akses layanan E- Government /SPBE	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Server Pemda Intranet - Persentase Layanan Publik yg dapat di Akses Secara Online	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi	98.516.000	99,94%
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi Dan Informasi	41.975.300	99,48%
			Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	147.308.500	99,80%
			Perencanaan Dan pengembangan Kebijakan Komunikai dan Informasi	144.694.000	99,42%



Meningkatnya Kualitas Akses Layanan Komunikasi Publik	- Jumlah Saluran Informasi		Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal	91.800.000	99,83%
Meningkatnya Akses Layanan Informasi Publik	- Jumlah Berita dan konten yang di Publikasikan - Persentase Permintaan data dan Informasi yang di Penuhi	Program kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Penyebaran Luasan Informasi Pembangunan Daerah	106.500.000	99,89%
			Penyebaran Luasan Informasi Penyelenggran Pemerintah Daerah	773.675.000	98,89%
			Penyebaran Luasan Informasi yang bersipat Penyuluhan bagi Masyarakat	150.900.000	99,40%
			Pengalanan Internet Kepada Masyarakat	44.984.000	99,69%

Dari Tabel di atas Menjelaskan Alokasi Anggaran belanja langsung tahun 2018 Rp. 3.650.000.000, yang dialokasikan untuk membiayai program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah Adapun total Realisasi Rp. 3.624.866.500 dan sisa Realisasi 25.133.500





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	$76 \% \leq 100\%$	Baik
3	$66 \% \leq 75 \%$	Cukup
4	$51 \% \leq 65 \%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Secara umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah



ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 5 sasaran dengan 15 indikator sasaran.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran		
1.	Meningkatnya Akses Layanan Aspirasi Publik	3	BS =	B = 3	SK =
			C =	K =	
2.	Meningkatnya Akses Layanan (E-Government)	5	BS = 2	B = 2	SK =
			C =	K = 1	
3.	Meningkatnya Akses Layanan Informasi Publik	5	BS = 1	B = 4	SK =
			C =	K =	
4.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan data Statistik tertentu serta data lainnya sebagai bahan Penyusun Kebijakan Perencanaan, elaporan dan Informasi Publik	1	BS =	B = 1	SK =
			C =	K =	
5.	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Persandian	1	BS =	B = 1	SK =
			C =	K =	
	JUMLAH	15	BS = 3	B = 11	SK =
			C =	K = 1	



3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat diquantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB.BONE 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Akses Layanan Aspirasi Publik	Jumlah Layanan Aspirasi	'5 Saluran - Saluran Layanan Aduan Kotak Saran - SMS/WA/LINE - Media Sosial (FB, TWITER, Telegram) - Online Melalui Website - Radio	'5 Saluran - Saluran Layanan Aduan Kotak Saran - SMS/WA/LINE - Media Sosial (FB, TWITER, Telegram) - Online Melalui Website - Radio	100%
		Kualitas Standar Pelayanan Aspirasi/Aduan	100%	100%	100%



		Persentase Asprasi /Aduan yang ditindak lanjuti	90%	90%	100%
2	Meningkatnya Akses Layanan (E-Government)	Jumlah Layanan System Aplikasi	6 Aplikasi	11 Aplikasi	100%
		Persentase OPD yang memanfaatkan Aplikasi	30% SKPD	50% SKPD	100%
		Persentase Penggunaan Jaringan Internet pada OPD	100%	50%	50 %
		Persentase Penggunaan Intranet Pada OPD	10 %	10 %	100%
		Jumlah Website dan Sub domain milik Pemerintah Daerah	1 Website 17 SubDomain	1 Website 17 SubDomain	100%
3	Meningkatnya Akses Layanan Informasi	Jumlah Saluran Penyampaian Informasi	- 11 Media Online - 3 Channel Radio - 3 Channel TV - 4 Media Cetak	- 11 Media Online - 3 Channel Radio - 3 Channel TV - 4 Media Cetak	100%



	Publik	Publik	- Baliho, Spanduk, dll = 30 titik Lokasi	- Baliho, Spanduk, dll = 30 titik Lokasi	
		Jangkauan Masyarakat dapat Menagkses Informasi Publik	80%	80%	100%
		Persentase RT yang Menggunakan HP,Radio dan Televisi	80%	80%	100%
		Jumlah KIM yang di Bina	6 Kim	8 Kim	100%
		Jumlah pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Kabupaten Bone	PPID Utama 66 PPID Pembantu	PPID Utama 66 PPID Pembantu	100%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral dan data Statistik tertentu serta	Cakupan Ketersediaan data Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	100%



	data lainya sebagai bahan Penyusun Kebijakan Perencanaan, elaporan dan Informasi Publik				
5	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Persandian	Perentase SKPD yang Menggunakan sistem Persandian dengan Efektif	90 %	90%	100%

Dari 5 (Lima) sasaran dengan 15 (Lima Belas) indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Kategori	JumlahIndikatorSasaran	Persentase (%)
Sasaran 1			
1.	BaikSekali	-	
2.	Baik	3	
3.	Cukup	-	
4.	Kurang	-	
5.	Sangat Kurang	-	
	Jumlah	3	
1.	BaikSekali	2	
2.	Baik	2	



3.	Cukup	-	
4.	Kurang	1	
5.	Sangat Kurang	-	
	Jumlah	5	
Sasaran 3			
1.	BaikSekali	1	
2.	Baik	4	
3.	Cukup	-	
4.	Kurang	-	
5.	Sangat Kurang	-	
	Jumlah	5	
Sasaran 4			
1.	BaikSekali	-	
2.	Baik	1	
3.	Cukup	-	
4.	Kurang	-	
5.	Sangat Kurang	-	
	Jumlah	1	
Sasaran 5			
1.	BaikSekali	1	
2.	Baik	-	
3.	Cukup	-	
4.	Kurang	-	
5.	Sangat Kurang	-	
	Jumlah	1	



Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Hasil analisis pencapaian indikator terhadap 5 (Lima) sasaran dengan 15 (Lima Belas) indikator kinerja, diketahui bahwa 3 (Tiga) indikator Baik Sekali, 11 indikator Baik, 1 indikator kurang

3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada Tahun 2018 ini, diperoleh melalui analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian kinerja Tahun 2018 , dengan proses analisis pengukuran, yaitu sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018;
- Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan realisasi capaian kinerja 2 tahun sebelumnya; (jika ada);
- Membandingkan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2017 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2013-2018; (jika ada);
- Membandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.

Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Realisasi capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 , dapat dilihat pada tabel di bawah ini;



SASARAN STRATEGIS PERTAMA	<i>Tersedianya Layanan Aspirasi Publik</i>			
Indikator Kinerja	Target2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Akses Layanan Aspirasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 Saluran Salura Layanan Aduan Kotak Saran SMS/WA/LINE - Media Sosial (FB,Twitter,Tlegram) - Online Melalui Website - Radio 	<ul style="list-style-type: none"> - Salura Layanan Aduan Kotak Saran SMS/WA/LINE - Media Sosial (FB,Twitter,Tlegram) - Online Melalui Website - Radio 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran Berdasarkan Data Capaian Kinerja Bidang Komunikasi Dinas Kominfo tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas standar Pelayanan Aspirasi /Aduan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% 	<ul style="list-style-type: none"> - 100%
<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Aduan yang ditindak Lanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> - 90% 	<ul style="list-style-type: none"> - 90% 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> - 90%
SASARAN STRATEGIS KE-DUA	<i>Meningkatnya Akses Layanan (E-Government)</i>			

[illegible]



SASARAN STRATEGIS KE-TIGA	Meningkatnya Akses Layanan Informasi Publik			
Indikator Kinerja	Target2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Keterangan
- Jumlah Saluran Penyampaian Informasi Publik	Media Online = 11 Media Audio = 3 Channel Radio Audio Visual = 2 Channel TV Media Cetak =4 Majalah/Koran Baliho,Spanduk, dll=30 Titik Lokasi	Media Online = 11 Media Audio = 3 Channel Radio Audio Visual = 2 Channel TV Media Cetak =4 Majalah/Koran Baliho,Spanduk, dll=30 Titik Lokasi	100%	Pengukuran Berdasarkan Capaian Kinerja Bidang Informasi Publik Dinas Kominfo tahun 2018
- Jangkauan Masyarakat dapat Mengakses Informasi Publik			100%	
- Persentase RT yang menggunakan HP,Radio dan TV	80%	80%	100%	
- Jumlah KIM yang di Bina	Kelompok Informasi Masyarakat = 6 KIM	Kelompok Informasi Masyarakat = 8 KIM	100%	
- Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas	PPID Utama 1 PPID Pembantu 66	PPID Utama 1 PPID Pembantu 66	100%	



i (PPID) Kabupaten Bone			100%	
- Persentase Jangkauan Wilayah Terjangkau siaran Televisi	50% Wilayah	50% Wilayah		
- Persentase Kecamatan terjangkau Media Cetak	50% (185 Desa/Kelurahan)	50% (185 Desa/Kelurahan)		
- Persentase Desa Terjangkau Media Cetak	100%	100%		
- Persentase Desa Terjangkau Media Online (GSM/CDA	50% (186 Desa/Kelurahan)	50% (186 Desa/Kelurahan)		
SASARAN STRATEGIS KE-EMPAT	<i>Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial Dan Data Statistik Tertentu serta data lainnya sebagai bahan penyusun kebijakan , Perencanaan , Pelaporan dan Informasi Publik</i>			
Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Keterangan
- Cakupan Ketersediaan n data Kebutuhan	90%	90%	100 %	Pengukuran Berdasarkan Capaian Kinerja Bidang Statistik Dinas Kominfo tahun 2018



SASARAN STRATEGIS KE-LIMA	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Persandian			
Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian (%)	Keterangan
- Persentase SKPD yang Menggunakan Sistem Persandian dengan Efektif	90%	90%		Pengukuran Berdasarkan Capaian Kinerja Bidang Persandian Dinas Kominfo tahun 2018
	90%	90%		

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja terhadap Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS PERTAMA	Meningkatnya Akses Layanan Aspirasi Publik		
	Capaian Kinerja		
Indikator Kinerja	2015	2016	2017
- Jumlah Saluran Layanan Aspirasi	-	-	100%
- Kualitas standar Pelayanan Aspirasi /Aduan			75%



SASARAN STRATEGIS KE-DUA	Tersedianya Akses Layanan Elektronik (E-Government)		
	<i>Capaian Kinerja</i>		
Indikator Kinerja	2015	2016	2017
- Jumlah Layanan System Aplikasi	-	-	100 %
- Persentase SKPD yang memanfaatkan Aplikasi	-	-	100%
- Persentase penggunaan jaringan Internet pada SKPD			100%
- Persentase Penggunaan jaringan Internet			100%
- Jumlah Website dan Sub domain milik Pemerintah Daerah			
SASARAN STRATEGIS KE-TIGA	<i>Tersedianya Akses layanan Informasi Publik</i>		
	<i>Capaian Kinerja</i>		
Indikator Kinerja	2015	2016	2017
- Jumlah Saluran Penyampaian	-	-	100%



Informasi Publik	-	-	100%
- Jangkauan Masyarakat dapat Mengakses Informasi Publik	-	-	100%
- Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bone	-	-	100%
- Persentase Jangkauan Wilayah Terjangkau siaran Radio	-	-	100%
- Persentase Jangkauan Wilayah Terjangkau siaran TV			75%
- Persentase Kecamatan terjangkau Media Cetak			



- Persentase Desa Terjangkau Media Online (GSM/CDMA)			
SASARAN STRATEGISKE-EMPAT	Tersedianya Data Base Pemerintah Daerah		
	<i>Capaian Kinerja</i>		
Indikator Kinerja	2015	2016	2017
- Jumlah Data Statistik	-	-	100%
- Jumlah Data Berbasis Aplikasi	-	-	100%
SASARAN STRATEGIS KE-LIMA	Terlaksanya Pengelolaan Jaringan dan Sandi Derah		
	<i>Capaian Kinerja</i>		
Indikator Kinerja	2015	2016	2017
- Tingkat Kelancaran Penyampaian Pesan	-	-	100%
- Persentase Distribusi Informasi yang tepat waktu dan	-	-	100%



tepat sasaran			
---------------	--	--	--

Realisasi Pada Tahun 2017 Mencapai Target dan Tabel Perbandingan 2015, 2016 masih kosong karna di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdiri pada akhir Tahun 2016

C. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

- Penyebab Utama Keberhasilan Mencapai Target Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2018 yaitu :
 1. Tersusunnya Perencanaan Sesuai daftar Perincian waktu yang direncanakan; Monitoring dan Evaluasi
 2. Penempatan Pegawai sesuai dengan Kompetensinya
 3. Penganggaran yang Mencukupi
- Analisis Penyebab / Kegagalan atau penurunan Kinerja

Sasaran 2 Meningkatnya akses Layanan (E-Goverment) pada Indikator Kinerja Persentase Penggunaan Jaringan Internet Pada SKPD dimana Terget dalam perjanjian Kinerja 100% sementara realisasi hanya 50% di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

 1. Masih rendahnya sosialisasi Manfaat website
 2. Masih banyak Perkampungan /Pedesaan yang belum terjangkau Jaringan Internet terutama Wilayah Pedalaman
 3. Mensaite Masyarakat tentang akses Internet Masih Rendah

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 sasaran dan 15 Indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di



bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran telah mencapai kinerja sebanyak 14 sasaran dengan 100% Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 3.56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Layanan (E-Goverment)	Jumlah Layanan System Aplikasi	100%	100%	
2	Meningkatnya Akses Layanan (E-Goverment)	Persentase OPD yang memanfaatkan Aplikasi	100%	100%	
3	Meningkatnya Akses Layanan Informasi Publik	Jumlah KIM yang di Bina	100%	100%	

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah Layanan		5 Saluran	5 Saluran	100%



	Aspirasi Publik	Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik	Salura Layanan Aduan Kotak Saran SMS/WA/LINE Media Sosial (FB,Twitter,Tlegram) Online Melalui Website Radio	Salura Layanan Aduan Kotak Saran SMS/WA/LINE Media Sosial (FB,Twitter,Tlegram) Online Melalui Website Radio	
			Kualitas Standar Pelayanan Aspirasi/Aduan	100%	100%
			Persentase Asprasi /Aduan yang ditindak lanjuti	90%	100%
2	Jumlah layanan Sistem Aplikasi	Program Pengembangan dan Implementasi E-Govement	6 Aplikasi	11 Aplikasi	100%
	Persentase Penggunaan Jaringan Internet OPD		100%	50%	50%
	Persentase Penggunaan Internet Pada OPD		10%	10%	100%
3	Jumlah Saluran Penyampaian Informasi Publik	Program fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Media Online = 11 Media Audio = 3 Channel Radio Audio Visual = 2 Channel TV Media Cetak =4 Majalah/ Koran Baliho,Spanduk, dll=30 Titik Lokasi	Media Online = 11 Media Audio = 3 Channel Radio Audio Visual = 2 Channel TV Media Cetak =4 Majalah/ Koran Baliho,Spanduk, dll=30 Titik Lokasi	100%



	Jangkauan Masyarakat dapat Mengakses Informasi Publik		80%	80%	100%
	Persentase RT yang Menggunakan HP, Radio dan Televisi		80%	80%	100%
	Jumlah KIM yang di Bina	Program pengembangan	6 Kim	8 Kim	100%
	Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan dokumen PPID Kabupaten Bone	Komunikasi Informasi dan Media Massa	PPID Utama 66 PPID Pembantu	PPID Utama 66 PPID Pembantu	100%
4	Cakupan Ketersediaan Data Sesuai Kebutuhan	Program pengembangan Data Informasi Statistik daerah	90%	95%	100%
5	Persentase SKPD yang Menggunakan Sistem Persandian dengan Efektif	Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi dan persandian	90%	90%	100%

Arti tabel diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya semua program dan kegiatan terkait satu sama lain dan semuanya menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja



secara keseluruhan persentase rata-rata dari capaian kinerja 15 indikator kinerja pada 5 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone Tahun 2018

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun Capaian dari 5 Sasaran dan 15 Indikator sudah Optimal namun masih tetap ada Permasalahan dari sasaran 2 yaitu : Meningkatnya Akses layanan (E-Government) dengan Indikator Persentase Penggunaan Jaringan Internet pada SKPD belum mencapai Target yang ditetapkan dari target 100% Namun yang terelisasi 50% Permasalahan Ini terjadi beberapa Faktor antara lain :

- Masih rendahnya sosialisasi Manfaat website Ke Setiap SKPD
- Masih banyak Kecamatan dan Desa desa yang belum terjangkau Jaringan Internet terutama Wilayah Pedalaman
- Menaikkan Masayarakat tentang akses Internet Masih Rendah

Kendala – Kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintahan Kab.Bone dalam Melakukan Penyebaran Luasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi public guna mewujudkan keterbukaan Informasi public dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK.konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk-baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Dan Adapun alternatif dan solusi Untuk di Capai yaitu :

- a. Meningkatkan Sosialisasi Website Pada SKPD dimana SKPD akan Sadar Pentingnya Website Bagi Pemerintah
 - Perlu Anggaran yang memadai untuk beberapa Area yang belum terjangkau jaringan Internet terutama Wilayah Pedalaman
- b. Kesadaran Masyarakat tentang Akses Internet Perlu di Tingkatkan Melalui sosialisasi internet sehat



i. SASARAN 2 YAITU : MENINGKATNYA AKSES LAYANAN (E-GOVERNMENT)

Tabel

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pada Sasaran

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penggunaan Jaringan Internet pada OPD

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1	Persentase Penggunaan Jaringan Internet Pada SKPD.	100%	50% SKPD	50%

Berdasarkan Tabel tersebut di atas diketahui bahwa realisasi target Kinerja Utama Persentase Penggunaan Jaringan Internet Pada OPD 100% dengan Capaian Kinerja 50% kurang dari target yang telah ditetapkan di akibatkan kurangnya kesadaran OPD Penggunaan Jaringan

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Pada Sasaran

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2016	2017	2018
1	Persentase Penggunaan Jaringan Internet Pada OPD	-	100%	50%



3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Penerimaan

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone pada tahun 2018 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Bone T. A. 2018 .Nilai pagu anggaran tahun 2018 Menurun dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel : Alokasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab.Bone terhadap APBD Kab. Bone T. A. 2018

TAHUN ANGGARAN N	PAGU ANGGARAN BELANJA		
	DPPA Dinas Kominfo	APBD Kab. Bone	% Terhadap APBD
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	6.257.483.037	6.257.483.037	

Persentase nilai anggaran belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone terhadap anggaran belanja APBD tahun 2018 sebesar Rp. 0,25%. Hal ini belum signifikan dengan kebutuhan anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab.Bone yang mana wilayah kerjanya mencakup seluruh Kab. Bone yang berfokus pada jaringan Komunikasi dan Informasi yang membutuhkan anggaran yang cukup besar minimal 1 % dari anggaran APBD Kabupaten Bone. Keterbatasan keuangan daerah pada APBD Kab.Bone menjadi alasan alokasi anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone belum dapat memenuhi keinginan tersebut diatas.Namun demikian tidaklah menjadi alasan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone untuk patah semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dalam



rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Bone terpilih periode tahun 2013-2018.

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kab.Bone, baik penyerapan anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai, maupun penyerapan anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 7.381.326.227,00,-atau 100% dari pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

2. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone Tahun 2018

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	2.607.483.037	2.256.434.814	48,52%
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	3.650.000.000	3.624.866.500	99,30%
JUMLAH	6.257.483.037	5.881.301.314	93,99%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi belanja terbesar dari pagu anggaran belanja langsung program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone pada tahun 2018 adalah belanja Barang dan jasa yang nilainya mencapai Rp.**3.650.000.000,00** Besarnya realisasi anggaran belanja sebesar **3.624.866.500** Barang dan Jasa dikarenakan banyaknya kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan persandian kab.bone



Realisasi penggunaan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan secara terinci dapat dilihat pada table

3. Pemanfaatan Anggaran .

Tabel Pemanfaatan Anggran

Kode	Komponen	Rencana (RP)	Realisasi		Fisik (%)
			RP	%	
01 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik	58.000.00	56.113.125	96,75%	
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	213.912.200	210.157.225	98,24%	
01.08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4992.000	99,84%	
01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-	11.730.000	11.730.000	100,00%	



	Undang				
01.23	Rapat-Rapat Koorinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	324.943.000	324.758.053	99,94%	
01.24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	296.375.000	295.933.900	99,85%	
02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	29.750.000	29.750.000	100,00%	
02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	407.000.000	406.630.000	99,91%	
02.10	Pengadaan Mebeleur	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00%	
02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	
02.24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	90.000.00,00	83,505.986	92,78%	
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	20.000.000,00	19.995.000	99,98%	



05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	60.000.000,00	59.961.000	99,94%	
06.01	Penyuusnan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihkstiari Realisasi Kinerja SKPD	36.752.000	36.738.500	99,96%	
06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	26.100.000,00	26.098.400	99,99%	
15.01	Pengolahan, Updating Dan Analisis Data dan Statistik Daerah	80.300.000,00	80.151.000	99,81%	
15.04	Verifikasi dan Validasi Sistem Data Base Desa (SDD)	93.785.000	93.448.000	99,64%	
15.05	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	141.000.000	140.249.819	99,47%	



15.02	Pembinaan Dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	98.516.000	98.455.400	99,94%	
15.03	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komuikasi Dan Informasi	41.975.300	41.756.000	99,48%	
15.06	Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi	147.308.500	147.019.711	99,80%	
15.07	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	144.694.000	143.849.800	99,42%	
15.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal	91.800.000	91.640.000	99,83%	
18.01	Penyebaran Luasan Informasi Pembangunan	106.500.00	106.377.781	99,89%	



	Daerah				
18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	106.500.000	106.377.781	99,89%	
18.02	Penyebaran Luasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	773.675.000	765.125.000	98,89%	
18.03	Penyebaran Luasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	150.900.00	150.000.000	99,40%	
18.04	Pengenalan Internet Kepada Masyarakat	44,984.000	44.843.800	99,69%	

4. Penghargaan yang di Terima

Kepala Dinas Komunikasi Informatika menerima penghargaan " Keterbukaan Informasi Publik " Peringkat II Terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan . Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Komisi Informasi Prov.Sulawesi Selatan

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone tahun 2019 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone juga disesuaikan dengan 5 (Lima) Bidang Urusan Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Bidang komunikasi, Bidang Tehnologi Informasi, Bidang Informasi Publik, Bidang statistik dan Bidang Persandian.

a. Permasalahan

Adapun faktor yang mempengaruhi Permasalahan dari setiap Bidang sebagai berikut :

1. Belum Tersedianya Sarana yang Memadai khususnya Pelayanan Berbasis Online sehingga Belum Terkoneksi Command Senter
2. Masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*.
3. Infra Struktur Jaringan belum memadai.
4. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta Up to Date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik.
5. Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Dinas Komnfo Kab.Bone dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika masih terbatas;
6. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas dan kuantitasih Kurangnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggara Pemerintah

b. Solusi

Kendala – Kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintahan Kab.Bone dalam Melakukan Penyebaran Luasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi public guna mewujudkan keterbukaan Informasi public dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK.

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 8 (Delapan) titik yang menjadi solusi yang akan di capai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah yang kompeten dan Profesional



2. Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana
4. Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e government pada layanan public
5. Berimplikasi pada Transpparansi Pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan , maupun laporan masyarakat suatu tindak pelanggaran Melalui Pengaduan dan pengolahn Konten Website
6. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengamanan Informasi Daerah
8. Meningkatkan Kualitas data ataupun hasil Pengamantan Data statistic Daerah



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018 menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2018 Dinas Komunikasi Informatika dan persandian yang merujuk pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, wujud pertanggung jawaban atas Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018 yang telah dijanjikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah menetapkan visi dalam Renstra Tahun 2013-2018, yaitu ***“Masyarakat Bone yang bersatu dan demokratis dalam kehidupan yang sehat, cerdas dan sejahtera”***. Dalam mencapai visi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Kabupaten Bone telah menetapkan target capaian kinerja berdasar kan sasaran strategis dalam dokumen perjanjian kinerja / penetapan kinerja setiap tahunnya dengan prioritas utama pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam periode Pemerintahan Bupati Bone Tahun 2013-2018.

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone pada tahun anggaran 2018, mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. **3.624.866.500,00**-atau 100% dari total pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari nilai penyerapan anggaran tersebut, realisasi belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone pada tahun 2018 sebesar Rp 3.624.866,500,00 atau 99,30% dari pagu anggaran belanja langsung,



Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kominfo Kab. Bone pada tahun 2018 cukup optimal dan cukup efisien bila capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan persentase rata-rata penggunaan anggaran belanja dari masing-masing program/kegiatan yang terlaksana pada tahun 2018.

Kedepannya, Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone akan difokuskan pada upaya mendorong tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Bone, melalui :

- Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan,
- Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
- Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone Tahun 2018 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone kepada Bupati Bone sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .

Watampone, 22 Januari 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Persandian,



Drs. ANDI AMRAN, M.Si.



Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19681122 198908 1 00 1

Sertifikat Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik
Peringkat Ke II
Kategori Pemerintah Kabupaten /Kota Tahun 2018





LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE
BULAN DESEMBER 2018.

NO REK	SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	%	BELANJA LANGSUNG	%	TOTAL REALISASI	%	FISIK	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Belanja Daerah	2,607,483,037.00	3,650,000,000.00	6,257,483,037.00	981,016,729.00	15.68	3,624,279,500.00	57.92	5,881,301,314.00	93.99		376,181,723.00
	Belanja Tidak Langsung	2,607,483,037.00		2,108,811,400.00		46.52%			2,256,434,814.00	46.52%		351,048,223.00
1	Belanja Pegawai	2,607,483,037.00		2,108,811,400.00	981,016,729.00	46.52%			2,256,434,814.00	46.52%		351,048,223.00
	Gaji Dan Tunjangan	2,607,483,037.00		2,108,811,400.00	9,810,167,129.00	46.52%			1,967,713,114.00	46.52%		141,098,286.00
	Belanja Langsung		3,650,000,000.00	3,650,000,000.00			3,624,279,500.00	99.30	3,624,279,500.00	99.30		25,133,500.00
1	Program Pelayanan Admitrasi Perkantoran		913,950,200.00	913,960,200.00			907,684,303.00	99.31	907,684,303.00	99.31		6,275,897.00
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik		58,000,000.00	58,000,000.00			56,113,125.00	96.75	56,113,125.00	96.75		1,886,875.00
	2 Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan		213,912,200.00	213,912,200.00			210,157,225.00	98.24	210,157,225.00	98.24		3,754,975.00
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	100.00	4,000,000.00	100.00		-
	4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5,000,000.00	5,000,000.00			4,992,000.00	99.84%	4,992,000.00	100.00		8,000.00
	5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		11,730,000.00	11,730,000.00			11,730,000.00	100%	11,730,000.00	100.00		-
	6 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalm Daerah dan Luar Daerah		324,943,000.00	324,943,000.00			324,758,053.00	99.94%	324,758,053.00	99.94		184,947.00
	7 Pelaksanaan Admistrasi Perkantoran		296,375,000.00	296,375,000.00			295,933,900.00	99.85%	295,933,900.00	99.85		441,100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		697,750,000.00	697,750,000.00			690,880,986.00	99.02	690,880,986.00	99.02		6,869,014.00
	8 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor		29,750,000.00	29,750,000.00			29,750,000.00	100.00	29,750,000.00	100.00		-
	9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		407,000,000.00	407,000,000.00			406,630,000.00	99.91	406,630,000.00	99.91		370,000.00
	10 Pengadaan Mebeleur		51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00	100.00	51,000,000.00	100.00		-
	11 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100%		-
	12 Ppemeliharaan Rutin/berkala kendraan Dinas/operasional		90,000,000.00	90,000,000.00			83,505,986.00	92.78	83,505,986.00	92.78		6,494,014.00
	13 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor		20,000,000.00	20,000,000.00			19,995,000.00	99.98	19,995,000.00	99.98		5,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur		60,000,000.00	60,000,000.00			59,961,000.00	99.94	59,961,000.00	99.94		39,000.00
	16 Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Peundang-undangan		60,000,000.00	60,000,000.00			59,961,000.00	99.94	59,961,000.00	99.94		39,000.00
4.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		62,852,000.00	62,852,000.00			62,836,900.00	99.98%	62,836,900.00	99.98%		15,100.00
	1 Penyusunan Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		36,752,000.00	36,752,000.00			36,738,500.00	99.96%	36,738,500.00	99.96%		13,500.00
	2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran.		26,100,000.00	26,100,000.00			26,098,400.00	99.99%	26,098,400.00	99.99%		1,600.00
	Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah		315,085,000.00	315,085,000.00			313,848,819.00	99.61	313,848,819.00	99.61		1,236,181.00
	17 Pengolahan,Updating Dan Analisis Dan Statistik Daerah		80,300,000.00	80,300,000.00			80,151,000.00	99.81	80,151,000.00	99.81		149,000.00
	18 Verifikasi dan Validasi Sistem Data Base Desa (SDD)		93,785,000.00	93,785,000.00			93,448,000.00	99.64	93,448,000.00	99.64		337,000.00
	19 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan		141,000,000.00	141,000,000.00			140,249,819.00	99.47	140,249,819.00	99.47		750,181.00
	Program Pengembangan Komunikasi,Informasi Dan Media Massa		524,293,800.00	524,293,800.00			522,720,911.00	99.70	522,720,911.00	99.70		1,572,889.00
	20 Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi		98,516,000.00	98,516,000.00			98,455,400.00	99.94	98,455,400.00	99.94		60,600.00
	21 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi Dan Informasi		41,975,300.00	41,975,300.00			41,756,000.00	99.48	41,756,000.00	99.48		219,300.00
	22 Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi		147,308,500.00	147,308,500.00			147,019,711.00	99.80%	147,019,711.00	99.80%		288,789.00
	23 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi		144,694,000.00	144,694,000.00			143,849,800.00	99.42%	143,849,800.00	99.42%		844,200.00
	24 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal		91,800,000.00	91,800,000.00			91,640,000.00	99.83	91,640,000.00	99.83		160,000.00

NO REK	SKPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	%	BELANJA LANGSUNG	%	TOTAL REALISASI	%	FISIK	SISA
--------	------	------------------------	------------------	----------------	------------------------	---	------------------	---	-----------------	---	-------	------

NO. URUT	PROGRAM	LANGSUNG	ALOKASI LANGSUNG	TOTAL PROGRAM	LANGSUNG	%	ALOKASI LANGSUNG	%	TOTAL PROGRAM	%	TOTAL	SIK
7	PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA.		1,076,059,000.00	1,076,059,000.00			1,066,346,581.00	99.10	1,066,933,581.00	99.15		9,125,419.00
25	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		106,500,000.00	106,500,000.00			106,377,781.00	99.89	106,377,781.00	99.89		122,219.00
26	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		773,675,000.00	773,675,000.00			765,125,000.00	98.89	765,125,000.00	98.89		8,550,000.00
27	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		150,900,000.00	150,900,000.00			150,000,000.00	99.40	150,587,000.00	99.79		313,000.00
28	Pengenalan Internet Kepada Masyarakat		44,984,000.00	44,984,000.00			44,843,800.00	99.69	44,843,800.00	99.69		140,200.00

Watampone, 31 Desember 2018

Kepala Dinas

Drs.ANDI AMRAN,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001



KEHATI-HATAN NETWORKING



Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

BAHAN DISKUSI



Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.



Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

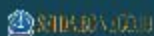
Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.

Agenda Kegiatan Jaringan Jaringan

Agenda kegiatan jaringan jaringan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 Januari 2021 di Hotel Grand Indonesia, Jakarta.



KEHATI-HATAN NETWORKING



Copyright © 2020. All rights reserved. Sekeloa Negeri KAMPUS 1 BONE ADVANCE 2020-2021

Website: www.sekeloanegeri.org





2013.03.15



Abstract



THE





HOME PROFIL LAYANAN REGULASI INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU DATA ARTIKEL BERITA



Bone Terbaik Kedua
Keterbukaan Informasi
Publik Tahun 2018



PPID Kabupaten Bone
Gelar Sosialisasi
Penguatan Tugas dan
Fungsi PPID



Pencanangan Desa Uloe
jadi Kampung "PUANG
WAWAN"



Pencanangan Desa Uloe Jadi
Kampung "PUANG WAWAN"



Data Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Tahun 2018



Perda Kabupaten Bone
Tahun 2018



Pemkab Bone Siap
Sukseskan Pemulangan
Jemaah Haji Tahun 2018

DATA CENTER

Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2018	Daftar Nomor Penting	RENCANA AKSI
RENCANA KERJA (RENJA)	Renstra	Daftar Peta Pemerintah Kabupaten Bone
Kabupaten Bone Dalam Angka		Jumlah Sambungan Induk Telepon Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone
Daftar Hotel di Kabupaten Bone	Daftar dan Alamat Puskesmas di Kabupaten Bone Tahun 2017	Daftar Rumah Sakit di Kabupaten Bone
Pelabuhan di Kabupaten Bone	INDIKATOR	IPM KABUPATEN BONE
STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BONE	STATISTIK DAERAH KABUPATEN BONE	
LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID DAN PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017	Dokumen Penyelenggaraan Bone Sehat	Potensi Wisata Kabupaten Bone
MAJALAH BONE BERADAT	Realisasi Bantuan Dana Hibah Tahun 2017	Daftar Penerima Hibah Tahun 2017
Daftar Apotek di Kabupaten Bone	REVISI RPJMD	Realisasi Bantuan Dana Hibah Tahun 2017
Inflasi	DAFTAR NAMA ALAMAT NOMOR TELEPON KADIS DAN KABAN KABUPATEN BONE	Susunan Pejabat PPID Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone
DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE	DAFTAR NAMA CAMAT SE KABUPATEN BONE	Database Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Bone



PPID.BONE.GO.ID

Jalan A. Mappanyukki No.1 Watampone

Hubungi kami: umid@bone.go.id





SIPPD

Login

User ID

Password

LOGIN

Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2019 © Maksimal Mediatech Sejahtera

